

The Role of Government Policy in the Development of Green Sukuk in Indonesia

Peran Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Green Sukuk di Indonesia

Jannatul Rohaini ✉, Adinda Rifantini, Mashudi

Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

✉ 220721100208@student.ac.id

Submit: 13-12-2024

Perbaikan: 15-01-2025

Diterima: 16-01-2025

ABSTRACT

Green sukuk has great potential in supporting the transition to a sustainable economy by providing a source of funding for environmentally friendly projects. a financial instrument that combines the principles of Islamic finance with environmental sustainability, it has great potential in supporting Indonesia's transition to a sustainable economy. challenges such as lack of awareness and capacity of financial institutions need to be overcome to optimise the contribution of Green Sukuk. The method used in this research is a qualitative method used to examine the object under study. The results showed that the government has a major contribution in developing green sukuk in Indonesia, such as addressing challenges that hinder the optimisation of green sukuk which can be overcome through strengthening regulations, socialisation, product innovation, and international cooperation, as well as discussing sectors that can be financed by Green Sukuk, such as renewable energy, sustainable natural resource management, energy efficiency, and sustainable transportation in the hope that the Green Sukuk market can continue to grow and support the achievement of sustainable development goals in Indonesia. This can help in improving the quality of research and implementation of green sukuk in Indonesia in the future.

Keywords: green sukuk, government policy, sustainable development

ABSTRAK

Green sukuk memiliki potensi besar dalam mendukung transisi menuju ekonomi berkelanjutan dengan menyediakan sumber pendanaan untuk proyek-proyek ramah lingkungan. berupa



instrumen keuangan yang menggabungkan prinsip-prinsip keuangan Islam dengan kelestarian lingkungan, memiliki potensi besar dalam mendukung transisi Indonesia menuju ekonomi berkelanjutan. tantangan seperti kurangnya kesadaran dan kapasitas institusi keuangan perlu diatasi untuk mengoptimalkan kontribusi Green Sukuk. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang dipakai untuk mencermati objek yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan pemerintah memiliki kontribusi besar dalam mengembangkan green sukuk di Indonesia, seperti menangani tantangan tantangan yang menghambat keoptimalan green sukuk yang bisa diatasi Melalui penguatan regulasi, sosialisasi, inovasi produk, dan kerjasama internasional, juga membahas sektor-sektor yang dapat dibiayai oleh Green Sukuk, seperti energi terbarukan, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, efisiensi energi, dan transportasi berkelanjutan dengan harapan pasar Green Sukuk dapat terus berkembang dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Hal ini dapat membantu dalam meningkatkan kualitas penelitian dan penerapan green sukuk di Indonesia di masa yang akan datang.

Kata kunci: green sukuk, kebijakan pemerintah, pengembangan berkelanjutan

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi dan kesepakatan kerja sama antar negara sangat berpengaruh terhadap pasar modal dunia, sehingga terjadi pola investasi dari pola *official development assistance* (ODA) dan *foreign Direct Investment* (FDI) ke pola portofolio. Seperti diketahui arus investasi melalui *official development assistance* (ODA) dan *foreign Direct Investment* (FDI) umumnya menggunakan sarana pemerintah yang disebut sebagai *sovereign borrowers*, atau melalui kedaulatan wilayah yang disebut *sovereign borders*. Sedangkan investasi portofolio, terutama dalam bentuk saham atau sekuritas umumnya bersifat *private* dan tidak mengenal batas kedaulatan suatu negara. Aliran dana akan mudah keluar masuk ke dalam suatu negara, dan hanya mempertimbangkan efisiensi pasar dan iklim yang kondusif bagi tumbuhnya investasi. Konsekuensinya tentu saja dengan kemunculan persaingan antar negara dan terintegrasinya pasar-pasar modal di dunia, integrasi akan membawa dampak terhadap suatu negara, baik itu negatif maupun positif. pengembangan industri keuangan, termasuk pasar modal, tidak bisa dilakukan secara isolasi. Indonesia harus selaras dengan perkembangan dan kebijakan pasar modal global yang semakin terintegrasi. Di sisi lain, kesadaran akan pentingnya

pembangunan berkelanjutan Meningkatkan secara global. Ini mendorong munculnya berbagai alat keuangan yang memprioritaskan aspek ekologis, sosial, dan tata kelola perusahaan (ESG). Untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia, pasar modal kita perlu beradaptasi dengan tren global ini. Kebijakan pemerintah memiliki peran krusial dalam pengembangan Green Sukuk di Indonesia, yang bertujuan untuk mendanai proyek-proyek berkelanjutan dan mengatasi perubahan iklim. Melalui regulasi dan insentif, pemerintah dapat mendorong partisipasi sektor swasta dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya investasi hijau¹.

Di Indonesia, pasar modal berperan sebagai salah satu pilar sistem keuangan. Salah satu barang yang diperjualbelikan di pasar saham adalah obligasi. Dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Obligasi Hijau, diharapkan seluruh aktivitas di pasar modal dapat selaras dengan prinsip keuangan berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU tersebut mendorong pengembangan dan penerapan instrumen ekonomi hijau di antaranya obligasi hijau, sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan berkelanjutan dan kegiatan ekonomi hijau untuk proyek-proyek berkelanjutan.²

Berdasarkan penelitian Karina, aktivitas industri yang mengandalkan sumber daya alam secara intensif dapat merusak lingkungan. Indonesia, sebagai negara yang tengah mengembangkan sektor industrinya, perlu mencari solusi untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan. Konsep *green sukuk* muncul sebagai pilihan pendanaan alternatif yang membantu proyek-proyek ramah lingkungan dan mendorong pembangunan berkelanjutan di Indonesia.³ Penelitian Ilyas Adhi Purba dan Binti Mutafarida menyoroti potensi besar *green sukuk* dalam mendukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia, terutama dengan adanya program MP3EI. Pemerintah telah berupaya mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam proyek-proyek infrastruktur. Penerbitan sukuk di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dalam lima tahun terakhir yakni pada tahun 2018-2022. Adapun tingkat persentase

¹ Yulia Anggraini, "Peran Green Sukuk Dalam Memperkokoh Posisi Indonesia Di Pasar Keuangan Syariah Global," *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business* 1, no. 2 (2018): 251, <https://doi.org/10.21154/elbarka.v1i2.1453>.

² Budi Endarto, Fikri Hadi, And Nur Hidayatul Fithri, "Politik Hukum Green Bond Di Indonesia," *Bina Hukum Lingkungan* 7, No. 1 (2022): 1–21, <https://doi.org/10.24970/Bhl.V7i1.303>.

³ Luthfia Ayu Karina, "Peluang Dan Tantangan Perkembangan Green Sukuk Di Indonesia," *Conference On Islamic Management, Accounting, And Economics (CIMAE) Proceeding* 2 (2019): 259–65.

pertumbuhan sukuk antara lain, 2019: 24,5%, 2020: 15,3%, 2021: 17,1%, dan 2022: 18,8%. Persentase pertumbuhan hanya mengalami penurunan pada tahun 2020, hal tersebut dianggap wajar karena Indonesia mengalami wabah *covid* pada waktu itu. total nilai sukuk yang beredar di Indonesia, juga menunjukkan positif.⁴ Namun, untuk memaksimalkan manfaat *green* sukuk, perlu diperhatikan bahwa instrumen keuangan ini tidak hanya sekedar memenuhi syarat syariah, tetapi juga harus berkontribusi pada tercapainya *maqashid* syariah yang lebih luas, seperti kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.⁵

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran aktif pemerintah dalam mendorong pengembangan *green* sukuk di Indonesia. Fokus kajian meliputi identifikasi kebijakan-kebijakan yang telah dan sedang diterapkan, serta strategi yang efektif untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan pasar *green* sukuk. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi berharga bagi para akademisi, pembuat kebijakan, dan pelaku industri keuangan yang tertarik untuk mendalami isu *green* sukuk.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang diterapkan penulis ialah kualitatif yang dipakai untuk mencermati objek yang diteliti.⁶ Dengan telaah studi pustaka. Studi pustaka adalah cara untuk menemukan referensi relevan terhadap masalah yang sedang dibahas. Ini melibatkan analisis teori, penelitian ilmiah, dan literatur jurnal saat ini. Selain itu, studi pustaka dapat memeriksa berbagai literatur terkait dan literatur terdahulu yang relevan untuk mendapatkan landasan teori permasalahan yang dibahas. Penelitian ini menggunakan berbagai sumber informasi untuk menghasilkan temuan yang relevan dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Sukuk Hijau

Green Sukuk merupakan instrumen investasi yang menggabungkan prinsip-prinsip keuangan syariah dengan komitmen terhadap kelestarian lingkungan. Mirip dengan obligasi konvensional, sukuk hijau ini dapat dibeli oleh investor

⁴ Ilyas Adhi Purba And Binti Mutafarida, "Eksistensi Green Sukuk Di Indonesia: Analisis Terhadap Fiqih Lingkungan Kh. Ali Yafie," *Jurnal Adz-Dzabab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 8, No. 2 (2023): 167–79, <https://doi.org/10.47435/Adz-Dzahab.V8i2.1687>.

⁵ Fitri Kurnia and Leli Suwita, "Analisis Peran Dan Kontribusi Green Sukuk Terhadap Implementasi Sustainable Development Goals (Sdg'S) Di Indonesia," *Jurnal Menara Ekonomi* 10, no. 2 (2024): 118–25.

⁶ Abdul Fatah Nassution, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : CV. Harva Creatife), 2023, 34.

yang ingin berkontribusi pada proyek-proyek ramah lingkungan. Dana yang terkumpul dari penjualan sukuk hijau dialokasikan secara khusus untuk membiayai berbagai inisiatif berkelanjutan, seperti pengembangan energi bersih, pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab, serta upaya-upaya untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Dengan berinvestasi dalam sukuk hijau, masyarakat tidak hanya memperoleh imbal hasil keuangan, tetapi juga berperan aktif dalam menjaga kelestarian bumi⁷. Beik Wijaya menjelaskan bahwa sukuk atau obligasi syariah merupakan instrumen keuangan jangka pendek yang unik karena penerbitnya wajib membagikan hasil kepada pemegang sukuk dalam bentuk *margin*. Berbeda dengan obligasi konvensional yang umumnya menawarkan bunga tetap, sukuk memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi dalam struktur kontraknya. Kontrak sukuk bisa didasarkan pada berbagai model bisnis Islam, seperti bagi hasil (*musyarakah, mudharabah*), jual beli (*istishna, salam, murabahah*), atau sewa (*ijarah*). Dengan kata lain, karakteristik utama yang membedakan sukuk dari obligasi konvensional adalah konsep *margin* sebagai pengganti bunga. Dalam sukuk, *margin* didapatkan dari hasil usaha yang dijalankan atas dasar akad yang disepakati, sedangkan bunga pada obligasi konvensional merupakan pembayaran tetap atas pinjaman⁸.

Perkembangan Green Sukuk di Indonesia

Green sukuk di Indonesia terus berkembang sebagai instrumen pembiayaan syariah untuk proyek-proyek berkelanjutan. *Green* sukuk merupakan salah satu bentuk komitmen Indonesia untuk mengatasi perubahan iklim. Sukuk adalah istilah dalam bahasa Arab untuk obligasi yang mengikuti prinsip syariah. Dalam fatwa nomor 32/DSN-MUI/IX/2002, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mendefinisikan sukuk sebagai surat berharga jangka panjang yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah, yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil *margin* atau *fee*, serta mengembalikan dana obligasi pada saat jatuh tempo. Pada tahun 2018, pemerintah Indonesia menerbitkan sukuk hijau bersamaan dengan obligasi hijau. Penerbitan ini dilakukan setelah disahkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60 /POJK.04/2017 pada tahun 2017 mengenai

⁷ Nur Ika Mauliyah, Hikmatul Hasanah, and Miftahul Hasanah, "Potensi Pengembangan Green Sukuk Dan Aspek Hukum Di Indonesia," *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2023): 221–34, <https://doi.org/10.36908/esha.v8i2.701>.

⁸ Aisya Sekar Gading Pujiyanto, Deariztria Dindalila, and Naufal Fakhruddin, "Narrative Review: Peluang Dan Tantangan Green Sukuk Di Indonesia," *DJIIEB Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business* 1, no. 4 (2021): 208–19.

penerbitan dan persyaratan efek bersifat utang berwawasan lingkungan (*Green Bond*). Berbeda dengan obligasi hijau, sukuk hijau mengikuti prinsip perbankan syariah. Setelah penerbitan sukuk hijau global pada tahun 2019, pemerintah melanjutkan dengan menerbitkan sukuk hijau ritel. Sukuk ini ditujukan untuk mendukung pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara serta mendanai proyek-proyek infrastruktur berkelanjutan. Instrumen ini juga diharapkan dapat menarik minat investor di pasar surat berharga negara domestik, khususnya mereka yang tertarik pada keuangan syariah⁹.

Pada tahun 2023, *green* sukuk telah mencapai beberapa pencapaian signifikan. Secara kumulatif, instrumen ini berhasil mengumpulkan dana sebesar USD6,9 miliar, dengan rincian USD5 miliar untuk sukuk hijau global, Rp21,86 triliun untuk sukuk hijau ritel, dan Rp6,73 triliun untuk sukuk hijau berbasis proyek. Dari segi profil penyaluran, sebagian besar dana yang dihimpun dialokasikan ke sektor transportasi berkelanjutan, diikuti oleh sektor ketahanan terhadap perubahan iklim, serta proyek-proyek pengelolaan air dan limbah air berkelanjutan. Sejak diterbitkan, sukuk hijau juga telah meraih beberapa penghargaan. Pada tahun 2020, instrumen ini mendapatkan penghargaan sebagai aset *triple A* dari *International Islamic Finance Awards* dan *3G Best Green Initiative of the Year* dari *Cambridge IFA*.

Penerbitan *green* sukuk di Indonesia memiliki sasaran terhadap berbagai sektor Dengan tujuan proyeknya masing-masing yang disebut dengan 9 *Eligible Green* Yang terdiri dari¹⁰:

1. *Renewable energy* (energi terbarukan) dengan berbagai bentuk proyek yang masuk Ke dalam peringkat dark green
2. *Sustainable management or natural resource* (manajemen keberlangsungan dan Sumber daya alam) dengan berbagai bentuk proyek yang masuk ke dalam peringkat *Light to dark Green*
3. *Energy efficiency* (efisiensi energi), termasuk beberapa proyek di dalamnya yang Memenuhi kriteria dengan peringkat *light to medium green*
4. *Green tourism* (pariwisata ramah lingkungan), dengan berbagai proyek dan Pendukungnya yang bertujuan untuk membangun kawasan wisata hijau yang masuk ke kriteria *medium to dark green*

⁹ Jihan Nabila, “PERAN DAN PERKEMBANGAN GREEN SUKUK PADA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA,” *AKRUAL: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 6.1 6, no. 1 (2024): 1–8.

¹⁰ Siti Mutmainnah and Muhammad Ryan Romadhon, “Pendayagunaan Green Sukuk Dalam Menghadapi Perubahan Iklim Di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBI)* 3, no. 1 (2023): 187–200, <https://doi.org/10.56013/jebi.v3i1.2021>.

5. *Reduction* (ketahanan terhadap perubahan iklim untuk area dan sektor yang sangat Rentan/pengurangan risiko bencana), termasuk ke dalam kriteria *dark green*
6. *Green buildings* (bangunan ramah lingkungan), dengan kriteria *light green*.
7. *Sustainable transport* (transportasi yang mendukung sistem keberlangsungan), yang merupakan bentuk dari pembangunan sistem transportasi yang berisi gas emisi, masuk kepada kriteria *medium to dark green*.
8. *Sustainable agriculture* (pertanian dengan sistem keberlangsungan), dengan kriteria yang termasuk *medium to dark green* I *Waste to energy and waste management* (sistem pembuangan yang dapat dialihkan Menjadi energi dan sistem pembuangan yang baik) dengan tujuan untuk Merehabilitasi tempat pembuangan akhir. Bentuk ini termasuk kepada kriteria *Medium to dark green*.

Berdasarkan laporan dari Kementerian Keuangan tentang alokasi dan dampak dari Penerbitan *green* sukuk di Indonesia hingga tahun 2020. *Green* sukuk yang dikeluarkan Oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2018 dan 2019 dialokasikan pada 5 sektor dari 9 *Eligible green* sector yang ada dengan alokasi pemanfaatan dana sukuk terbesar adalah Pada sektor *Sustainable Transport*, yaitu 62% pada *Green* sukuk keluaran tahun 2018 dan 48% untuk *Green* sukuk keluaran tahun 2019, di mana *Sustainable Transport* masuk ke dalam peringkat *medium to dark green*, yang berarti memiliki visi jangka panjang terhadap komitmen pembangunan rendah karbon dan perubahan iklim. Proyek-proyek *Sustainable Transport* yang digarap dengan dana *Green* sukuk ini adalah proyek rel Kereta di Pantai Utara Pulau Jawa, proyek rel kereta lintas Sumatera dan proyek rel Kereta Jabodetabek. Keduanya diharapkan dapat mengurangi kepadatan kendaraan Bermotor pada jalur transportasi darat, di mana kedua pulau ini termasuk pulau-pulau Yang pada penduduknya, serta mempermudah distribusi bahan-bahan produksi dari Wilayah-wilayah di kedua pulau ini.

Sektor *Green* Sukuk

Green sukuk adalah instrumen keuangan syariah yang dirancang khusus untuk membiayai proyek-proyek yang memiliki dampak positif terhadap lingkungan. Dengan meningkatnya kesadaran akan perubahan iklim dan pentingnya keberlanjutan, *green* sukuk menjadi salah satu solusi untuk mendukung investasi dalam sektor-sektor yang ramah lingkungan. Berikut adalah penjelasan terperinci mengenai sektor-sektor yang dapat dibiayai oleh *green* sukuk¹¹:

¹¹ Suherman, Iswan Noor, and Asfi Manzilati, "Identifikasi Potensi Pasar Green Sukuk Republik Indonesia," *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 6, no. 1 (2019): 1–17.

a. Energi Terbarukan

Proyek yang berkaitan dengan pengembangan dan penggunaan sumber energi terbarukan, seperti tenaga surya, angin, hidro, dan biomassa. Investasi dalam sektor ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mengurangi emisi gas rumah kaca.

b. Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan

Proyek yang berfokus pada pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, termasuk hutan, air, dan tanah. Ini mencakup praktik-praktik yang menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah eksploitasi berlebihan.

c. Efisiensi Energi

Proyek yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi dalam berbagai sektor, seperti industri, transportasi, dan bangunan. Ini dapat mencakup teknologi baru, perbaikan infrastruktur, dan praktik manajemen yang lebih baik untuk mengurangi konsumsi energi

d. Pariwisata Hijau

Investasi dalam proyek pariwisata yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga melestarikan lingkungan dan budaya lokal. Ini termasuk pengembangan ekowisata dan inisiatif yang mendukung konservasi.

e. Ketahanan Terhadap Perubahan Iklim

Proyek yang dirancang untuk meningkatkan ketahanan masyarakat dan ekosistem terhadap dampak perubahan iklim, seperti banjir, kekeringan, dan bencana alam lainnya. Ini bisa mencakup pembangunan infrastruktur yang tahan bencana dan program adaptasi.

f. Bangunan Hijau

Investasi dalam pembangunan dan renovasi bangunan yang memenuhi standar ramah lingkungan, seperti penggunaan material berkelanjutan, efisiensi energi, dan pengelolaan air yang baik. Bangunan hijau bertujuan untuk mengurangi jejak karbon dan meningkatkan kualitas hidup penghuninya.

g. Transportasi Berkelanjutan

Proyek yang mendukung pengembangan sistem transportasi yang ramah lingkungan, seperti transportasi umum yang efisien, kendaraan listrik, dan infrastruktur untuk pejalan kaki dan pesepeda. Ini bertujuan untuk mengurangi emisi dari sektor transportasi.

h. Pertanian Berkelanjutan

Investasi dalam praktik pertanian yang berkelanjutan, termasuk pertanian organik, agroforestri, dan teknik pertanian yang mengurangi dampak lingkungan.

Ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan sambil menjaga kesehatan tanah dan ekosistem.

i. Pengelolaan Limbah dan Energi Limbah

Proyek yang berfokus pada pengelolaan limbah secara efektif, termasuk daur ulang, pengurangan limbah, dan konversi limbah menjadi energi. Ini membantu mengurangi pencemaran dan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan lebih baik.

Kontribusi *Green* Sukuk

Green sukuk tidak hanya berfungsi sebagai alat pembiayaan, tetapi juga sebagai sarana untuk mendorong investasi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Dengan mendukung proyek-proyek yang berkontribusi pada mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta pelestarian keanekaragaman hayati, *green* sukuk berperan penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan mengatasi tantangan lingkungan global. Secara keseluruhan, *green* sukuk merupakan instrumen yang inovatif dan strategis dalam mendukung transisi menuju ekonomi yang lebih hijau dan berkelanjutan, serta memberikan peluang bagi investor untuk berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. Sukuk di Indonesia mulai dikenal sejak Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menerbitkan fatwa No. 32/DSN- MUI/IX/2002. Kehadiran sukuk menguatkan perkembangan sektor dari pasar modal syariah di Indonesia. Saat ini, orientasi negara-negara di dunia menyorot pertumbuhan ekonomi berbasis lingkungan. Sejak 2018, pemerintah Indonesia telah berhasil menerbitkan sukuk hijau senilai USD 5 juta di seluruh dunia. Penerbitan sukuk hijau pada tahun 2022 menyoroti sukuk hijau terbesar yang pernah ada secara global. Proyek penurunan emisi sukuk hijau penerbitan global telah mencapai lebih dari 10 juta ton.¹²

Dalam rangka menyambut dan memanfaatkan peluang *green* sukuk yang besar tersebut, pemerintah sendiri memilih untuk melakukan strategi inovasi dan diversifikasi instrumen dengan menerbitkan *green* sukuk ritel pertama di Indonesia pada November 2019. Penerbitan *green* sukuk ritel tersebut kembali mendapatkan

¹² Angrahita Grahesti, Dzul Fahma Nafii"ah, and Elyana Pramuningtyas, "Green Sukuk: Investasi Hijau Berbasis Syariah Dalam Mewujudkan Ketahanan Terhadap Perubahan Iklim Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 3374, <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6443>.

respons positif terutama dari generasi milenial dengan persentase generasi milenial sebesar 56% dari keseluruhan investor.¹³

Hadirnya tipe investor baru tersebut di sisi lain juga merupakan sebuah tantangan baru yang perlu pemerintah perhatikan, di mana kepercayaan dari kelompok *green* investor ini perlu dijaga dan dipertahankan. Dalam menjaga kepercayaan tersebut, pemerintah harus dapat menyajikan pelaporan yang transparan serta akuntabel dari hasil penjualan *green* sukuk serta laporan yang jelas terkait dampak apa yang telah diberikan oleh *green* sukuk terhadap lingkungan khususnya dalam proses mendorong transisi ekonomi kepada ekonomi hijau. Terkait penyajian laporan yang akuntabel tersebut, hal ini akan sangat berkaitan dengan ketersediaan sumber daya manusia yang profesional dan memiliki pemahaman yang komprehensif terkait ekonomi dan keuangan syariah, khususnya terkait skema sukuk sendiri. Sayangnya, saat ini sumber daya manusia yang memiliki kapabilitas tersebut masih cukup terbatas dan pemerintah perlu memperhatikan lebih lanjut terkait ketersediaan sumber daya manusia tersebut.¹⁴

Penerbitan *Green* Sukuk juga mencerminkan komitmen pemerintah Indonesia dalam mendukung pertumbuhan pasar keuangan yang berkelanjutan. Dengan penekanan pada aspek lingkungan dan kepatuhan syariah, *Green* Sukuk menunjukkan kesungguhan Indonesia dalam menghadapi tantangan pembangunan berkelanjutan. Lebih dari itu, *Green* Sukuk juga berfungsi sebagai instrumen yang memberikan sinyal positif bagi pasar keuangan global, terutama dalam upaya memperluas pasar *green* bond dan *green* sukuk di kawasan Asia Tenggara. Dengan demikian, *Green* Sukuk tidak hanya memberikan manfaat finansial, tetapi juga berperan dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, baik di Indonesia maupun secara global.¹⁵

Kebijakan pemerintah dalam pengembangan *Green* Sukuk di Indonesia

¹³ Widyaiswara Eri Hariyanto, "Green Financing, Sukuk Negara Dan Pembangunan Berkelanjutan," 2018.

¹⁴ M F I Farisi, "Membangun Indonesia Hijau: Mendorong Ekonomi Berkelanjutan Dengan Kekuatan Green Sukuk," *Researchgate.Net*, No. December 2022 (2024), https://www.researchgate.net/profile/Muhammad-Farisi3/publication/378155020_Membangun_Indonesia_Hijau_Mendorong_Ekonomi_Berkelanjutan_Dengan_Kekuatan_Green_Sukuk/links/65caebba7900745497817af2/Membangun-Indonesia-Hijau-Mendorong-Ekonomi-Berkelanjutan-Den.

¹⁵ Arifudin Arifudin et al., "Green Sukuk: Tantangan Dan Strategi Pengembangan Untuk Pembangunan Berkelanjutan Serta Menuju Ekonomi Hijau," *SANTRI: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 2, no. 3 (2024): 12–20, <https://doi.org/10.61132/santri.v2i3.555>.

Adapun kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam pengembangan *green* sukuk di Indonesia adalah sebagai berikut:¹⁶

1. Regulasi dan Kebijakan

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi yang mendukung penerbitan *Green* Sukuk, termasuk peraturan yang mengatur tentang investasi berkelanjutan. Kebijakan ini mencakup penetapan standar untuk proyek yang memenuhi kriteria hijau, sehingga investor dapat yakin bahwa dana mereka digunakan untuk tujuan yang berkelanjutan.

2. Insentif Fiskal

Pemerintah memberikan insentif fiskal bagi investor yang berpartisipasi dalam *Green* Sukuk, seperti pengurangan pajak atau keuntungan lainnya. Insentif ini bertujuan untuk menarik lebih banyak investor, baik domestik maupun internasional, untuk berinvestasi dalam proyek-proyek hijau. Juga dengan Penyediaan dana atau jaminan dari pemerintah untuk proyek-proyek yang dibiayai oleh *Green* Sukuk, sehingga mengurangi risiko bagi investor.

3. Peningkatan Kesadaran dan Edukasi

Melalui kampanye dan program edukasi, pemerintah berusaha meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku pasar tentang pentingnya investasi hijau. Dan melakukan Edukasi dengan memberikan informasi mengenai manfaat *Green* Sukuk dan dampaknya terhadap pembangunan berkelanjutan. Menyediakan informasi dan pelatihan bagi investor dan pengembang proyek tentang cara mengakses dan memanfaatkan *Green* Sukuk.

4. Kolaborasi dengan Sektor Swasta

Dengan Mendorong kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta dalam pengembangan proyek hijau, untuk memaksimalkan sumber daya dan keahlian. Kerjasama ini penting untuk memastikan bahwa proyek yang dibiayai tidak hanya berkelanjutan tetapi juga menguntungkan secara ekonomi. Dengan Membentuk forum atau platform untuk dialog antara pemerintah, investor, dan pengembang proyek untuk berbagi informasi dan pengalaman.

5. Monitoring dan Evaluasi

Pemerintah juga bertanggung jawab untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proyek-proyek yang dibiayai oleh *Green* Sukuk, dengan Mengembangkan sistem untuk memantau dan mengevaluasi dampak lingkungan dari proyek yang dibiayai oleh *Green* Sukuk. Hal ini penting untuk memastikan bahwa dana digunakan secara efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan dalam hal keberlanjutan lingkungan.

¹⁶ Siti Saffa' and Syed Marwan, "Green Sukuk," *Islamic Green Finance* 9, no. 10 (2024): 182–92, <https://doi.org/10.4324/9781032672946-23>.

Tantangan Pemerintah dalam Pengembangan *Green Sukuk* di Indonesia.

Meskipun *green sukuk* menawarkan potensi yang menjanjikan untuk mendukung proyek-proyek berkelanjutan, pengembangannya di Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah tantangan. Menurut OJK, ada lima tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pembiayaan ramah lingkungan:¹⁷

1. Kurangnya kapasitas institusi keuangan dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko sosial dan lingkungan. Akibatnya, banyak lembaga keuangan kurang peka terhadap potensi risiko yang terkait dengan proyek-proyek ramah lingkungan, sehingga upaya mitigasi risiko pun menjadi kurang optimal. Hal ini menjadi hambatan signifikan dalam mendorong pertumbuhan pembiayaan hijau di Indonesia.
2. Kurangnya kesadaran di kalangan lembaga keuangan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, proyek-proyek ramah lingkungan dianggap memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan proyek konvensional. Kedua, kurangnya insentif dari pemerintah untuk mendorong investasi pada proyek-proyek hijau juga menjadi penghambat. Selain itu, masih belum adanya kesepakatan yang jelas di antara berbagai pihak terkait mengenai definisi yang pasti untuk proyek hijau dan non-hijau juga menyulitkan proses pengambilan keputusan.¹⁸
3. Ketidaksesuaian jangka waktu pembiayaan. Proyek-proyek ramah lingkungan umumnya membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mencapai titik impas dibandingkan proyek konvensional. Sementara itu, kebanyakan produk pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan memiliki jangka waktu yang lebih pendek. Hal ini membuat proyek-proyek hijau menjadi kurang menarik bagi lembaga keuangan.
4. Kurangnya informasi mengenai proyek-proyek ramah lingkungan. Jumlah proyek-proyek hijau yang ada saat ini masih terbatas dan merupakan bagian kecil dari keseluruhan bisnis suatu perusahaan. Kurangnya informasi yang transparan dan komprehensif mengenai proyek-proyek ini membuat lembaga keuangan kesulitan dalam melakukan evaluasi risiko dan potensi keuntungan.
5. Terbatasnya kapasitas perbankan dalam mendukung proyek-proyek ramah lingkungan. Kurangnya minat perbankan ini sejalan dengan kurang populernya isu-isu lingkungan di kalangan masyarakat secara umum. Meskipun pemerintah Indonesia telah mengakui pentingnya pembiayaan

¹⁷ Erwin Haryono, "Lima Strategi Majukan Sukuk Hijau Dan Digitalisasi Ekonomi Syariah Siaran Pers," 2022.

¹⁸ Saffa' and Marwan, "Green Sukuk."

hijau dalam mencapai kesejahteraan bangsa dan pembangunan berkelanjutan, namun kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam isu lingkungan membuat perbankan cenderung lebih berhati-hati dalam mengalokasikan dana untuk proyek-proyek yang dianggap berisiko tinggi atau kurang menguntungkan secara finansial dalam jangka pendek. Akibatnya, proyek-proyek ramah lingkungan kesulitan mendapatkan akses pembiayaan yang memadai.¹⁹

Adapun beberapa tantangan lainnya yang dihadapi oleh Indonesia dalam pengembangan Pasar obligasi syariah berbasis lingkungan (*Green sukuk*) di Indonesia antara lain:²⁰

1. Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam bidang keuangan syariah dan lingkungan menjadi kendala dalam pengembangan *green sukuk*. Selain itu, kurangnya pemahaman di kalangan investor dan pelaku pasar secara umum tentang produk keuangan syariah yang berbasis lingkungan juga menghambat pertumbuhan *green sukuk*. Sebagai produk inovasi yang relatif baru, *green sukuk* masih memerlukan waktu untuk lebih dikenal dan diterima oleh pasar.
2. Masyarakat masih kurang memahami dan mengetahui tentang inovasi produk investasi syariah seperti *green sukuk*.
3. Investasi pada *green sukuk* dapat membawa risiko yang lebih besar dibandingkan investasi konvensional. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti penggunaan teknologi baru yang masih dalam tahap pengembangan dalam proyek-proyek ramah lingkungan, serta kondisi geografis Indonesia yang rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, gunung meletus, dan tsunami.
4. Investor umumnya tertarik pada *green sukuk* karena reputasi positif yang terkait dengan investasi berkelanjutan. Namun, penelitian menunjukkan bahwa kinerja *green sukuk* setelah penerbitan tidak selalu berkorelasi dengan tingginya permintaan saat penawaran. Fluktuasi harga *green sukuk* di Indonesia lebih dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro daripada faktor lingkungan.

¹⁹ Pujiantoro, Dindalila, and Fakhruddin, "Narrative Review: Peluang Dan Tantangan Green Sukuk Di Indonesia."

²⁰ Mariana, Kukul Tondoyekti, and Fachrozi, "Ekonomi Hijau Dan Bisnis Syariah: Mempromosikan Bisnis Yang Berkelanjutan Dan Bertanggung Jawab," *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (Jebma)* 04, no. 02 (2024): 873–82.

Strategi Pemerintah Indonesia untuk Mengembangkan *Green Sukuk* dan Pasar Obligasi Syariah Berbasis Lingkungan

Adapun strategi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengembangkan *green sukuk* dan pasar obligasi syariah yang berbasis lingkungan adalah sebagai berikut:²¹

1. Penguatan regulasi

Pemerintah dapat memperkuat kerangka regulasi dengan menciptakan insentif yang lebih menarik bagi investor dan memperjelas kebijakan yang mendukung proyek-proyek hijau.

2. Pengembangan produk

Pemerintah dapat mendorong inovasi produk *green sukuk* dengan menggali potensi sektor-sektor baru seperti energi terbarukan dan pengelolaan limbah.

3. Peningkatan akses informasi

Pemerintah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kampanye yang lebih intensif dan menyediakan platform yang komprehensif.

4. Pendorong Pendidikan

Pemerintah dapat mendukung pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan prinsip-prinsip keuangan syariah dan keberlanjutan dalam pendidikan formal.

5. Kerjasama Internasional

pemerintah dapat belajar dari praktik terbaik negara lain dan berkolaborasi dalam proyek-proyek regional dan global.²²

Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan pada *Annual Assembly* IsDB ke-50, yang bertema *Quickening Climate Fund through Green and Maintainability* Sukuk, di Riyadh, Arab Saudi, pada 29 April 2024, bahwa kesuksesan Indonesia menjadi negara penerbit *Green Sukuk* dengan nilai *withering* besar di dunia sangat diapresiasi oleh negara-negara anggota IsDB.

Dalam kesempatan ini, Gubernur BI juga menekankan bahwa ada tiga komponen penting yang memastikan keberhasilan Indonesia dalam mengembangkan dan mengelola Sukuk:²³

²¹ kementerian Koordinator Bidang Perekonomian And Republik Indonesia, “Kolaborasi Pemerintah dan Swasta Dukung Pengembangan dan Keberlanjutan Usaha Para Pelaku UMKM,” 2022.

²² Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, “Green Sukuk, Solusi Pembangunan Berkelanjutan Indonesia Di Tengah Krisis,” 2023.

²³ bank Indonesia, “Kontribusi Green Sukuk Indonesia Torehkan Capaian Positif,” 2024, https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_268724.aspx.

1. Sinergi multipihak: Pencapaian komitmen investasi yang solid memerlukan sinergi yang kuat dengan mitra strategis, koordinasi menyeluruh antar pemangku kepentingan, serta kampanye sosialisasi yang masif.
2. Kerangka kerja komprehensif: Pengembangan *Green* Sukuk memerlukan perumusan strategi dan kerangka kerja yang jelas, didukung oleh landasan politik, kebijakan, dan regulasi yang kondusif, serta kerja sama internasional yang berbasis pada standar praktik terbaik.
3. Instrumen moneter inovatif: Penerbitan sukuk berperan sebagai instrumen moneter yang efektif dalam mendukung kebijakan fiskal dan pengembangan pasar uang. Lebih lanjut, SUVBI sebagai instrumen moneter pro-market telah memberikan alternatif bagi pengelolaan likuiditas pelaku keuangan syariah dalam rangka mendukung stabilitas nilai tukar.

Bank Indonesia telah berhasil memfasilitasi integrasi pasar keuangan jangka panjang, khususnya yang berbasis lingkungan, dengan pasar keuangan jangka pendek. Prestasi ini tercermin dari keberhasilan penerbitan SUKBI yang telah menjadi instrumen sentral dalam pendalaman pasar keuangan dan pengelolaan moneter syariah di Bank Indonesia. Penggunaan sukuk hijau sebagai fundamental SUKBI dinilai sebagai praktik yang patut diadopsi oleh bank sentral anggota IsDB lainnya untuk memperluas cakupan dan kedalaman pasar keuangan syariah global.

Gubernur BI menyampaikan bahwa dengan mengimplementasikan kelima strategi yang telah diuraikan, potensi risiko dalam proses transisi ekonomi menuju rendah karbon dapat diminimalisasi.²⁴

KESIMPULAN

Green sukuk merupakan instrumen pembiayaan berbasis syariah yang bertujuan untuk membiayai proyek-proyek ramah lingkungan. Kebijakan pemerintah memiliki peran yang krusial dalam pengembangan *green* sukuk di Indonesia. Untuk mencapai potensi penuh *green* sukuk, pemerintah harus meningkatkan regulasi yang mendukung, mengatasi tantangan yang ada, dan mempromosikan manfaat dari investasi hijau, meskipun *green* sukuk memiliki prospek yang positif, pengembangan di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, seperti kekurangan kapasitas pada institusi keuangan, kurangnya kesadaran lembaga keuangan, dan terbatasnya sumber daya manusia. Berbagai

²⁴ Bank Indonesia, "Lima Strategi Majukan Sukuk Hijau Dan Digitalisasi Ekonomi Syariah," 2022, https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2431022.aspx#:~:text=Kelima%20strategi%20tersebut%20adalah%3A%20%28i%29%20mendorong%20komitmen%20bersama%2C%20%28iv%29%20memperkuat%20komunikasi%2C%20dan%28v%29%20optimalisasi%20digitalisasi.

strategi telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi tantangan tersebut, seperti pembentukan peraturan dan kebijakan, pendampingan dan bimbingan, promosi dan sosialisasi, serta pengembangan infrastruktur. *Green Sukuk* memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia, namun diperlukan upaya yang lebih kuat dari semua pihak untuk mempercepat pertumbuhan pasar *Green Sukuk* dan pasar obligasi syariah berbasis lingkungan di Indonesia.

REFERENSI

- Abdul Fatah Nassution. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Harva Creatife. Vol. 4. Bandung, 2017.
- Adhi Purba, Ilyas, and Binti Mutafarida. "Eksistensi Green Sukuk Di Indonesia: Analisis Terhadap Fiqih Lingkungan Kh. Ali Yafie." *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 8, no. 2 (2023): 167–79. <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v8i2.1687>.
- Anggraini, Yulia. "Peran Green Sukuk Dalam Memperkokoh Posisi Indonesia Di Pasar Keuangan Syariah Global." *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business* 1, no. 2 (2018): 251. <https://doi.org/10.21154/elbarka.v1i2.1453>.
- Arifudin Arifudin, Neli Anjani, Neneng Serliana, Mia Auliah, and Amaliah Amaliah. "Green Sukuk: Tantangan Dan Strategi Pengembangan Untuk Pembangunan Berkelanjutan Serta Menuju Ekonomi Hijau." *SANTRI: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 2, no. 3 (2024): 12–20. <https://doi.org/10.61132/santri.v2i3.555>.
- bank indonesia. "Kontribusi Green Sukuk Indonesia Torehkan Capaian Positif," 2024. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_268724.aspx.
- Bisnis, Fakultas Ekonomi Dan, and Universitas Airlangga. "Green Sukuk, Solusi Pembangunan Berkelanjutan Indonesia Di Tengah Krisis," 2023.
- Endarto, Budi, Fikri Hadi, and Nur Hidayatul Fithri. "Politik Hukum Green Bond Di Indonesia." *Bina Hukum Lingkungan* 7, no. 1 (2022): 1–21. <https://doi.org/10.24970/bhl.v7i1.303>.
- Eri Hariyanto, Widyaiswara. "Green Financing, Sukuk Negara Dan Pembangunan Berkelanjutan," 2018.
- Farisi, M F I. "Membangun Indonesia Hijau: Mendorong Ekonomi Berkelanjutan Dengan Kekuatan Green Sukuk." *Researchgate.Net*, no. December 2022 (2024).
- Grahesti, Angrahita, Dzul Fahma Nafii"ah, and Elyana Pramuningtyas. "Green Sukuk: Investasi Hijau Berbasis Syariah Dalam Mewujudkan Ketahanan Terhadap Perubahan Iklim Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 3374. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6443>.
- Haryono, Erwin. "Lima Strategi Majukan Sukuk Hijau Dan Digitalisasi Ekonomi Syariah Siaran Pers," 2022.
- Indonesia, Bank. "Lima Strategi Majukan Sukuk Hijau Dan Digitalisasi Ekonomi Syariah," 2022. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2431022.aspx#:~:text=Kelima strategi tersebut adalah%3A%28i%29mendorong komitmen bersama,hijau%2C%28iv%29

memperkuat komunikasi%2C dan %28v%29 optimalisasi digitalisasi.

- Karina, Luthfia Ayu. "Peluang Dan Tantangan Perkembangan Green Sukuk Di Indonesia." *Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMAE) Proceeding 2* (2019): 259–65.
- Kurnia, Fitri, and Leli Suwita. "Analisis Peran Dan Kontribusi Green Sukuk Terhadap Implementasi Sustainable Development Goals (Sdg'S) Di Indonesia." *Jurnal Menara Ekonomi* 10, no. 2 (2024): 118–25.
- Mariana, Kukuh Tondoyekti, and Fachrozi. "Ekonomi Hijau Dan Bisnis Syariah: Mempromosikan Bisnis Yang Berkelanjutan Dan Bertanggung Jawab." *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (Jebma)* 04, no. 02 (2024): 873–82.
- Mauliyah, Nur Ika, Hikmatul Hasanah, and Miftahul Hasanah. "Potensi Pengembangan Green Sukuk Dan Aspek Hukum Di Indonesia." *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2023): 221–34. <https://doi.org/10.36908/esh.v8i2.701>.
- Mutmainnah, Siti, and Muhammad Ryan Romadhon. "Pendayagunaan Green Sukuk Dalam Menghadapi Perubahan Iklim Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBI)* 3, no. 1 (2023): 187–200. <https://doi.org/10.56013/jebi.v3i1.2021>.
- Nabila, Jihan. "Peran Dan Perkembangan Green Sukuk Pada Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia." *AKRUAL: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 6.1 6, no. 1 (2024): 1–8.
- Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang, And Republik Indonesia. "Kolaborasi Pemerintah Dan Swasta Dukung Pengembangan Dan Keberlanjutan Usaha Para Pelaku UMKM," 2022.
- Pujiantoro, Aisya Sekar Gading, Deariztria Dindalila, and Naufal Fakhruddin. "Narrative Review: Peluang Dan Tantangan Green Sukuk Di Indonesia." *DJIEB Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business* 1, no. 4 (2021): 208–19.
- Saffa', Siti, and Syed Marwan. "Green Sukuk." *Islamic Green Finance* 9, no. 10 (2024): 182–92. <https://doi.org/10.4324/9781032672946-23>.
- Suherman, Iswan Noor, and Asfi Manzilati. "Identifikasi Potensi Pasar Green Sukuk Republik Indonesia." *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 6, no. 1 (2019): 1–17.